

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM
PENGAWASAN ASET DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RISNAWATI
167310564

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Peran Inpektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Usulan Penelitian.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan pengajuan judul usulan penelitian ini sehingga sampai pada Skripsi ini layak di ujiankan.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk diujiankan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.
6. Untuk teman teman saya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama perkuliahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan.Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 9 juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan	15
3. Konsep Pemerintah	16
4. Konsep Pengawasan.....	17
5. Konsep Peranan	22
6. Pemerintah Daerah Kabupaten	24
7. Konsep Manajemen Pemerintahan	27
8. Konsep Kepemimpinan.....	29
9. Konsep Perencanaan	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasionalisasi Variabel	36
F. Teknik Pengukuran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal Penelitian	44
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu	47
1. Demografi	47
B. Pertumbuhan Ekonomi.....	50
C. Topografi.....	53
D. Sejarah Singkat Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu	55
E. Visi dan Misi.....	58
F. Struktur Organisasi dan Tupoksi Inspektorat	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	70
1. Jenis Kelamin	72
2. Umur	72
B. Hasil dan Pembahasan	73
1. Menentukan Standar dan Sasaran	73
2. Mengukur kenyataan yang sebenarnya dengan standar	75
3. Identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif.....	78
C. Faktor Penghambat	83
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.....	10
I.2 Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.....	9
II.1 Penelitian Terdahulu.....	33
II. 2 Operasional Variabel.....	36
III.1 Keadaan Populasi dan Sampel.....	40
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	44
VI.1 Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	49
V.1 Distribusi Jenis Kelamin pegawai Inspektorat.....	72
V.2 Distribusi Umur ASN di Kabupaten Indragiri Hulu.....	72
V.3 Distribusi Jawaban responden inspektorat terhadap indikator menentukan Jenis standar dan sasaran.....	73
V.4 Distribusi Jawaban Responden ASN terhadap indikator menentukan Jenis standar dan sasaran.....	74
V.5 Distribusi Jawaban Responden Inspektorat terhadap Indikator membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar	76
V.6 Distribusi Jawaban Responden ASN terhadap Indikator membandingkan Kenyataan yang sebenarnya terhadap Standar...	77
V7. Distribusi Jawaban Responden Inspektorat terhadap Indikator Identifikasi Penyimpangan dan Pengambilan Tindakan Korektif.	78
V.8 Distribusi Jawaban Responden ASN terhadap Indikator Identifikasi Penyimpangan da Pengambilan tindakan koreftif.....	80
V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Inspektorat.....	81
V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden ASN.....	82

V.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Inspektorat dan ASN	83
---	----

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
I.I Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu	8
II.2 Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Qusioner Penelitian	89
Lampiran 2 Wawancara Penelitian	96
Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	99
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	100
Lampiran 5 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu	101
Lampiran 6 Surat Keterangan Dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan Penelitian.....	102
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	103

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Peserta ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Risnawati
Npm : 167310564
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam
Pengawasan Aset Daerah

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koreprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 22 juni 2020
Pernyataan

Risnawati



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENGAWASAN ASET DAERAH

ABSTRAK

Risnawati

Kata Kunci : Peran, Pengawasan , Aset Daerah

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset daerah. Adapun Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif, Penulisan ini Menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan Permasalahan peran inspektorat dalam pengawasan aset daerah tepatnya terkait dengan penggunaan Kendaraan Dinas di luar jam kerja di lingkungan kabupaten Indragiri Hulu, Dengan Kuisioner dan Wawancara serta Observasi sebagai alat Pengumpulan data, dan Data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 6 kelompok Populasi dan Sampel dalam penelitian ini. Dan jenis serta Teknik Pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel Frekuensi sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penelitian ini masih masuk dalam Kategori Cukup Berperan , Dimana dalam Penelitian ini masih banyaknya ASN di Kabapten Indragiri Hulu yang masih menggunakan kendaraan dinas di luar jam kerja dan juga karena pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu masih harus di perketat agar penyimpangan seperti itu bisa di minimalisir.

THE ROLE OF INDRAGIRI HULU DISTRICT INSPECTORATE IN REGIONAL ASSET CONTROL

ABSTRACT

Risnawati

Keywords: Role, Supervision, Regional Assets

The purpose of this research is to describe the role of Indragiri Hulu Regency Inspectorate in the supervision of regional assets. The method used in this research is the Quantitative Method with Descriptive Analysis Techniques, this writing illustrates the condition of objects found in the field based on data related to the problem of the role of the inspectorate in the issuance of regional assets precisely related to the use of official vehicles outside working hours in the district of Indragiri Hulu district, with questionnaires and interviews and observations as a data collection tool, and the data collected is then presented as raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence and purpose of research at the location being examined. There are 6 population groups and samples in this study. And the type and Data Collection Techniques used consist of Primary Data and Secondary Data obtained with the Frequency table tool in accordance with the observations made by the author, it can be concluded that the implementation of this research is still included in the Fairly Role Category, Wherein the Research is still the number of ASNs in the Regency of Indragiri Hulu that still uses official vehicles outside working hours and also because the supervision carried out by the Inspectorate of Indragiri Hulu Regency must still be tightened so that such deviations can be minimized.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Dengan melihat hal tersebut jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dengan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan bertanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan, pada ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2) dikatakan Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementrian. Inspektorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Inspektorat Daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah memainkan peran sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Konsekuensi dalam pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan harus menghilangkan tuntutan kebutuhan individual dengan mengutamakan tuntutan kelembagaan berdasarkan kearifan pengawasan (*control wisdom*), moralitas pengawasan (*control morality*), nilai-nilai pengawasan (*control value*), kejujuran pengawasan (*control honesty*) dan lain sebagainya, yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Menjadi suatu pendapat umum dimana bahwa kelancaran pelaksanaan pengawasan terutama penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan suatu Negara atau bangsa senantiasa membutuhkan atau dengan kata lain harus ditunjang oleh hubungan kerja yang baik dan harmonis dari semua pihak. Instrumen pengawasan dalam pemerintahan sebenarnya diperlukan adanya keseragaman tertentu baik yang berhubungan dengan pola perilaku, aturan yang dianutnya, maupun pekerjaan yang dilakukan agar dapat menciptakan kinerja dengan kualitas tinggi dan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kelembagaan pemerintahan.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat di kategorikan menjadi dua , yaitu :

1. Benda tidak Bergerak (Real Property),meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan gedung
 - c. Bangunan air
 - d. Jalan dan jembatan
 - e. Instalasi
 - f. Jaringan
 - g. Monumen/bangunan bersejarah
2. Benda bergerak (Personal Property)
 - a. Mesin
 - b. Kendaraan
 - c. Peralatan,meliputi : alat berat, alat angkatan,alat bengkel, alat pertanian,alat kantor, dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran,alat laboratorium, dan alat keamanan
 - d. Buku-buku
 - e. Barang bercorak kesenian dan kebudayaan
 - f. Hewan ternak dan tanaman
 - g. Pesediaan (barang abis pakai, suku cadang,bahan baku, bahan penolong)
 - h. Surat surat berharga

Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana utama pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah melakukan aktifitas rutin untuk melaksanakan kegiatan operasional yang ada di daerah supaya lebih maju dan berkembang. Agar Pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang lebih lengkap yang dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai badan pemerintahan memerlukan bermacam-macam fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu fasilitasnya yang dibutuhkan adalah kendaraan dinas yang nantinya diharapkan aparat pemerintah mampu memanfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kendaraan dinas yang digunakan aparat pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan pengadaan barang pemerintah.

Peraturan dan pedoman pengelolaan kendaraan dinas diatur dalam masing-masing daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:

- a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- c. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- d. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

- e. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden;
- g. memberikan persetujuan atas usul Pemindah tanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- h. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
- i. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
- j. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
- l. menyusun laporan Barang Milik Negara; melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara;
- m. dan menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata cara kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pasal 2 menyebutkan Kedudukan Inspektorat Kabupaten:

1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Pemerintahan Daerah;
2. Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur;
3. Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tugas Inspektur adalah:

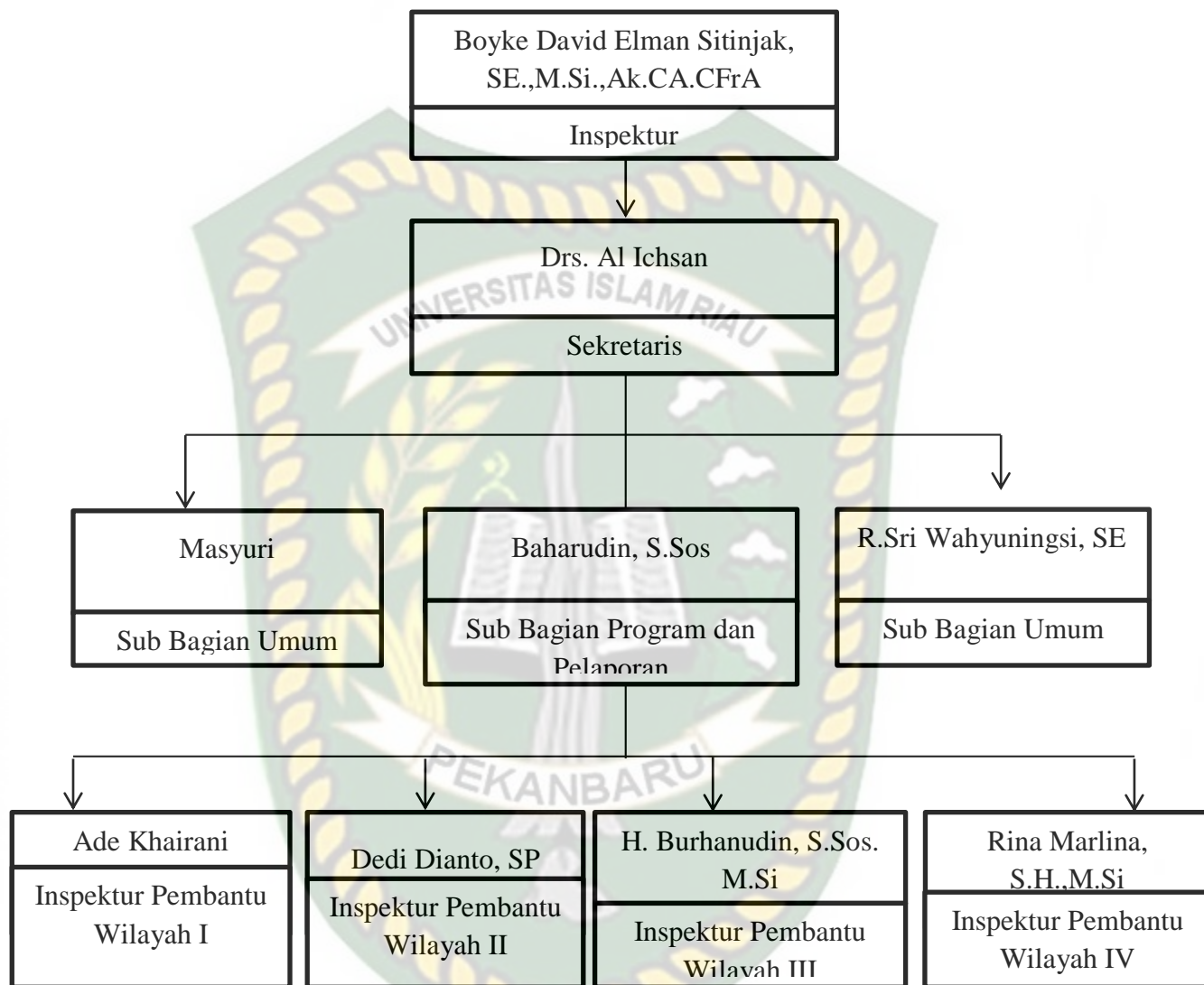
1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) terbatas pada kegiatan pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), inspektur mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan pengawasan.

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris membawahi;
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Kelompok jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Kelompok jabatan fungsional umum.

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat



Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Visinya adalah Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang bersih dan Berwibawa melalui pengawasan Yang Profesional. Sedangkan yang menjadi Misi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Menumbuh kembangkan budaya pengawasan yang berpedoman kepada norma-norma dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan membudayakan Iman dan taqwa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam hal ini terkait dengan Kendaraan Perorangan Dinas , yaitu Kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang di gunakan bagi pemangku jabatan seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota /Wakil wali Kota , dan Sekretaris Daerah

Dan berdasarkan Permenkeu 76/2015 seorang pejabat dapat mendapatkan Kendaraan Dinas seperti mobil dinas apabila sudah memiliki tingkat jabatan Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala Kantor dengan wilayah kerja minimal 1 Kabupaten/Kota. Terkait dengan Pejabat yang dibekali lebih dari 1 mobil dinas dan mewah,berdasarkan penjelasan diatas bagi setiap jabatan ada standar kebutuhan yang ditetapka. Standar kebutuhan ini yang menentukan jenis kendaraan dinas bagi setiap jabatan , hanya jabatan seorang menteri dan setingkatnya yang dapat memiliki lebih dari satu kendaraan Dinas, yaitu dua kendaraan dinas dengan tipe SUV dan tipe sedan. Untuk jabatan di bawah menteri, hanya boleh memiliki 1 kendaraan dinas dengan spesifikasi tertentu.

Terkait dengan sanksi tersebut seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahn 2010 tentang disiplin pegawai, penentuan ringan, sedang dan beratnya sanksi tergantung BAPnya , fakta dan pelanggarannya contoh untuk pelanggaran berat menghilangkan Kendaraan Dinas dan tidak mengindahkan imbau

dari atasan, sanksi tersebut mulai dari pemberhentian jabatan serta ganti rugi dari kendaraan dinas yang hilang.

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau, Kebersihannya terletak di ibu kotanya yakni Rengat.

Tabel I.1 : Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Merk	Unit
1	Daihatsu	52
2	Mitsubishi	25
3	Toyota	128
4	Chevrolet	24
5	Nissan	17
6	Isuzu	4
7	Hino	10
8	Kia	2
9	Suzuki	2
JUMLAH		264

Sumber : Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

Dari tabel I.1 di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat Jumlah Kendaraan Dinas roda empat milik Pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri atas 9 model kendaraan.

Tabel I.2 : Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Merk	Unit
1	Honda	303
2	Yamaha	82
3	Kawasaki	35
4	Suzuki	25
JUMLAH		445

Sumber : Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

Berasarkan Latar Belakang yang di paparkan diatas peneliti menemukan fenomena-fenomena yaitu:

1. Terindikasi adanya penggunaan kendaraan dinas diluar jam kerja, misalnya pada Hari libur Raya atau Hari Besar Keagamaan.
2. Kurangnya Pengawasan yang di lakukan oleh Inspektorat terkait penggunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah**”.

B. Rumusan Masalah

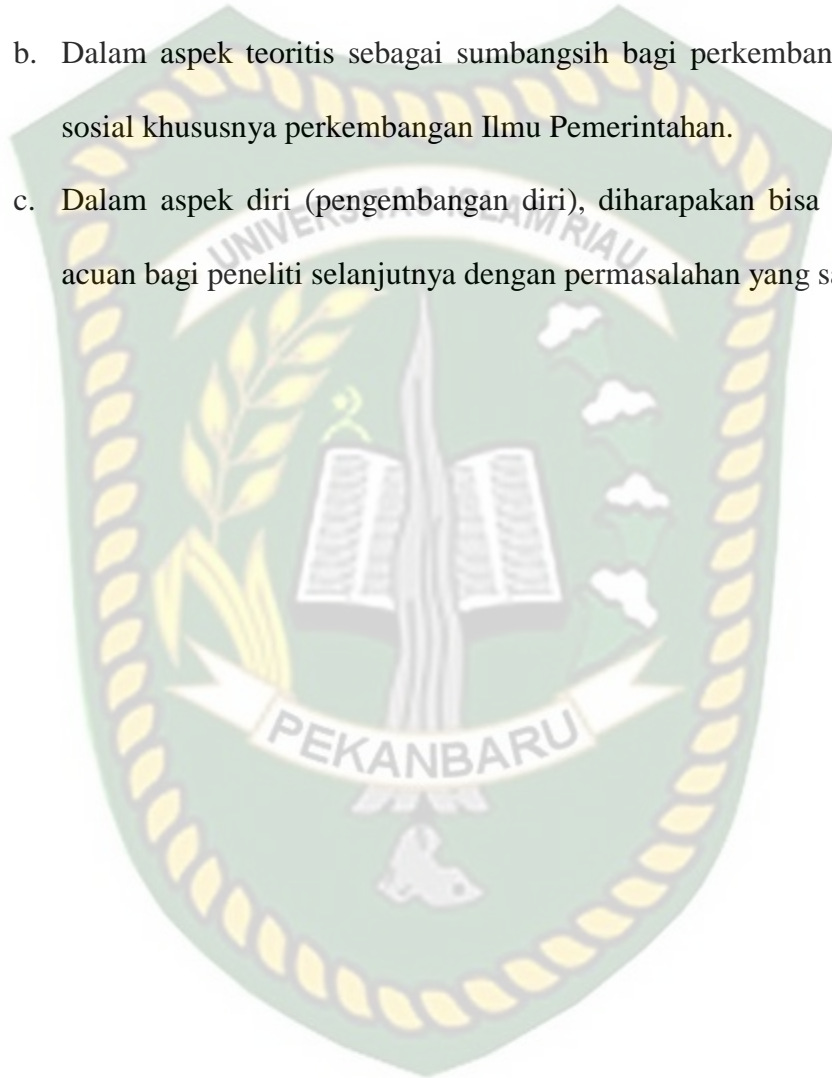
Dengan melihat fenomena-fenomena yang ada diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan rumusan masalah “**Bagaimana Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pegawasan Aset Daerah?**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dalam aspek praktis sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Dalam aspek teoritis sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya perkembangan Ilmu Pemerintahan.
- c. Dalam aspek diri (pengembangan diri), diharapkan bisa sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005;3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaftar (dalam Ndraha, 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Menurut Musanef (dalam syafiie, 2005;32-33) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasiaan kedalam hubungan antara dinas0dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar,
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan anantara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihidari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efesiensi dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena betapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Munaf, Yusri (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara

Selanjutnya menurut Ndraha (2011:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan sipil. Sedangkan menurut Mustafa (2013:98) Pemerintahan adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan Pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Syafiie (2013:12) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam

hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Namun menurut R. Mac. Iver (dalam Syafiiee, 2011:10) *Government is the organization of men under authority..how men can be governed*. Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan.... Bagaimana manusia itu bisa di perintah. Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012:6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.

3. Konsep Pemerintah

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011:4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, Pelayanan yang mana dalam kamus besar

bahasa Indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat.
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

4. Konsep Pengawasan

George R. Terry (dalam Syafiee, 2013;130), *Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, that is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Munaf (2016;99) Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni:

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.

- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Menurut Syafiee (2013;132) Pengawasan dalam bentuk pemantauan dan pengamatan tingkat efektifitas pejabat birokrasi pemerintahan, bukan untuk mencari kesalahan seorang pejabat melainkan mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah mencapai hasil sebagaimana rencana, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan, berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum begitu juga tidak melanggar moral yang berlaku.

Menurut Ndraha (2011;200-201) Pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum sesuatu terjadi, dan bukan setelah segala sesuatu telah terjadi. Pengawasan adalah budaya prometheanistik, lawan budaya epimetheanistik. Salah satu versi pengawasan yang telah populer di Indonesia, yaitu pengawasan- melekat atau control atasan terhadap bawahan, diuraikan di bawah. Di Indonesia, pengawasan diartikan sebagai pengawasan sebelum, sepanjang, dan sesudah sesuatu terjadi. Bentuk- bentuk dalam pengawasan yakni :

1. Pengawasan Ekstern dan Intern

- a. Pengawasan Ekstern, yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintah, tetapi kepada DPR. (Sujamto 1986:81-82)
- b. Pengawasan Intern, merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya inspektur wilayah kabupaten/kota (Sujamto 1986:81-82)

2. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

- a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan sesuatu yang bersifat rencana (Sujamto, 1986 : 85)
- b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk dari pengawasan atas jalannya pemerintah (Sujamto, 1986 : 85)

3. Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah

4. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap objek yang diawasi jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik makan yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau langsung itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan
- b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang di lakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja dalam pengawasan tidak langsung antara lain laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insedentil, laporan hasil pemeriksaan dari pengawan lain, surat-surat pengaduan, berita atau artikel di mass media, dokumen lain yang terkait.

Sed,angkan Gary Dessler (1999:113) menyebutkan 3 langkah pokok dalam

Pengawasan, yaitu:

1. Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menentukan standar dalam pelaksanaan . standar adalah suatu satuan yang dijadikan patokan penilaian bagi hasil-hasil suatu kegiatan, antara lain ada 3 jenis standar secara umum :

- a. Standar Fisik , meliputi kuantitas seperti jumlah barang dan jasa jumlah produksi, dll
- b. Standar Moneter, meliputi standar yang berhubungan dengan uang dan biaya
- c. Standar Waktu, meliputi waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan selain itu juga terdapat standar-standar lainnya yang tidak dapat dihitung atau diukur, yaitu standar kualitatif semisal kerja sama tim dalam menyelesaikan masalah.

2. Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar

Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan secara nyata, pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan untuk kegiatan tersebut contohnya : Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan, Bagaimana Proses dari pelaksanaan tersebut, setelah frekuensi serta monitoring ditetapkan , pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang ulang.

3. Identifikasi Penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif.

Kegiatan ini hanya dilakukan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kegiatan, tindakan koreksi dapat berupa : mengubah standar awal, mengubah pengukuran pelaksanaan, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan masalah.

Menurut Sondang P.Siagian dalam Makmur menyebutkan Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002: 243). Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang

memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Dalam Soerjono (2012:12) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranannya. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Tak ada peranan tanpa mencakup 3 hal tersebut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten menurut kamus bahasa adalah daerah tingkat II yang di kepalai oleh seorang bupati, setingkat dengan kota, merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil, dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragamnya sosial budaya. Maka Undang-undang Negara Republik

Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya diamandemen menegaskan sebagai berikut. “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan menginggat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang sistem pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah berapa kali pemerintah membentuk undang-undang tentang pemerintah daerah, dimana setiap perubahan-perubahan terhadap ketentuan pemerintah daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak otonomi bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelolah rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri. Sesuai dengan ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, kemudian Manan (2001:59) mengemukakan bahwa sistem rumah tangga pemerintah daerah tersebut adalah :

- a. Harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam bidang peraturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
- b. Pada dasarnya pengurusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
- c. Sebagai konsekuensi dari butir (2) di atas, maka sistem rumah tangga harus memberikan tempat prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
- d. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
- e. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah. Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukkan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah tangga daerah harus terutama

ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru.

Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkungannya terbatas daerah jurisdiksinya. Pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Amandemen undang-undang dasar 1945.

7. Konsep Manajemen pemerintahan

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2007: 268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004: 1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dalam mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2002: 9) adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (2009: 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarah
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007: 176) manajemen pemerintah adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen pemerintahan Daerah Indonesia dilandasi oleh Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (1986: 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimanasemuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

8. Konsep Kepemimpinan

Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Henry Pratt Fairchild (dalam Kartono 2010:23) pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial 11 dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi.

Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009-119) bahwa pemimpin (leader) adalah :

- a. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan.
- b. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif: manajemen dan kepemimpinan.
- c. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan.
- d. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang

memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

9. Konsep Perencanaan

Ndraha (2011;161) Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasikan tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur: target, T) organisasi. Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai (siap gerak). Menurut Handoko (dalam Darwis, 2007; 54) mengemukakan dua alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan. Pertama, berkaitan dengan "*protective benefit*" yang diperoleh dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dengan adanya perencanaan. Kedua, berkaitan dengan "*protective benefit*" yang diperoleh dalam bentuk peningkatan sukses pencapaian tujuan organisasi karena adanya perencanaan. Hal ini dipahami bahwa dengan adanya perencanaan, disamping persiapan input lebih baik, juga prosesnya lebih baik sehingga lebih jelas memungkinkan menghasilkan output yang lebih baik pula.

Perencanaan adalah rangkaian kegiatan menciptakan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang berdasarkan fakta-fakta dan pemikiran yang matang dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan juga merupakan pedoman dan acuan bagi para pelaksana kegiatan, agar kegiatan yang dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan harus memperhatikan waktu, biaya dan personil. Perencanaan bukanlah jaminan bagi suatu tindakan pemilihan yang terbaik atau menguntungkan bagi berbagai alternatif dalam

usaha pencapaian tujuan. Adapun perencanaan dianggap sebagai suatu fungsi manajemen, dipimpinan (manager) wajib dilaksanakan perencanaan sebagai pedoman dalam kegiatannya. Untuk mencapai tujuan kejelasam apa yang dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya.

Sedangkan menurut Manullang dalam Darwis (2007;56) mengatakan bahwa rencana yang baik harus mengandung beberapa sifat yaitu Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang dalam arti mudah dimengerti untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Fleksibel, artinya rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga-duga sebelumnya, Mempunyai stabilitas, yang berarti tidak perlu setiap kali dirubah atau tidak dipakai sama sekali, Ada dalam pertimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan factor-faktor produksi kepada setiap unsur organisasi seimbang dengan kebutuhannya dan Meliputi semua tindakan yang diperluka, artinya haruslah rencana tersebut meliputi segala-segalannya sehingga terjamin koordinasi dari tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

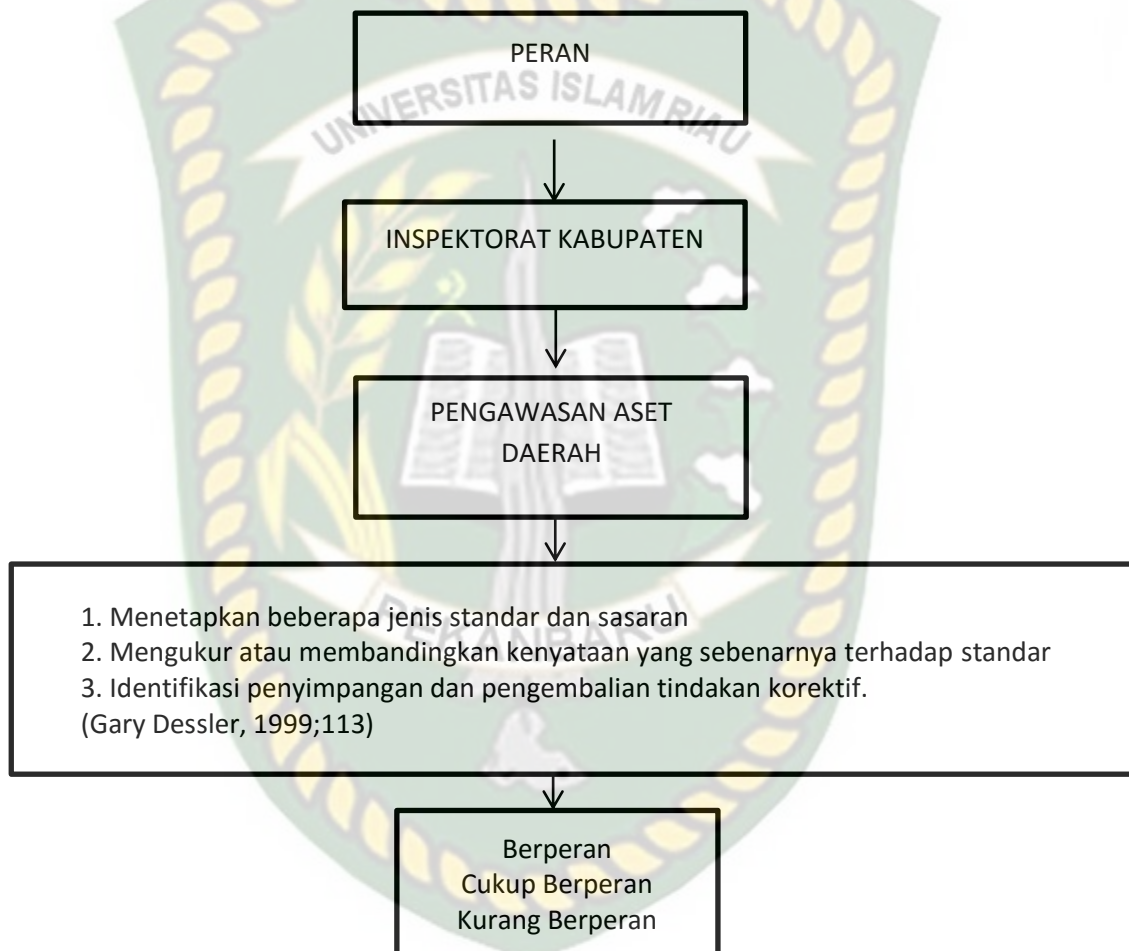
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Tipe penelitian
1	Angela Mulyani, Herman Karamoy (2017)	Optimalisasi fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud	Menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan eksploratori
2	Grace, Jenny Morasa (2017)	Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah daerah Kabupaten Talaud	Menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan eksploratori
3	Michel Rendika (2013)	Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian survey
4	Hedi Setiawan , Tri Sukirno Putro (2016)	Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif

C. Kerangka Pikir

Adapun Kerangka pikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Peranan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan definisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu:

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

- a. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
- b. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- c. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- e. Perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu.
- f. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas di Pemerintahan Daerah.

- g. Aset Daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset-aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak adalah kendaraan dinas, sedangkan yang tidak bergerak adalah lahan, bangunan. Dalam aspek lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah,

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dari penelitian ini yang berjudul Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel II 2 : Operasional Variabel Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Pengawasan merupakan menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran, mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar, dan identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif (Garry Dessler, 1999:113)	Pengawasan	a.Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran	a.Adanya Standar b.Adanya Sasaran	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		b.Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar	a.Melihat Fakta dilapangan b.Membandingkan dengan standar	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		c.Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif.	a.Melakukan Identifikasi terhadap Penyimpangan b.Pengembalian tindakan korektif	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik yang digunakan dalam penelitian Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran

Berperan :Apabila ketiga item penilaian telah dilaksanakan atau Tanggapan responden berada pada kategori ≥ 66 %.

Cukup Berperan :Apabila hanya satu dari tiga item yang dilaksanakan atau Tanggapan atau tanggapan responden berada pada kategori 34-65 %.

Kurang Berperan :Apabila tidak satupun dari tiga item yang dilaksanakan Atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33 %.

2. Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar

Berperan :Apabila ketiga item penilaian telah dilaksanakan atau Tanggapan responden berada pada kategori ≥ 66 %.

Cukup Berperan :Apabila hanya satu dari tiga item yang dilaksanakan atau Tanggapan atau tanggapan responden berada pada kategori 34-65 %.

Kurang Berperan :Apabila tidak satupun dari tiga item yang dilaksanakan Atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33 %.

3. Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif

Berperan :Apabila ketiga item penilaian telah dilaksanakan atau Tanggapan responden berada pada kategori ≥ 66 %.

Cukup Berperan :Apabila hanya satu dari tiga item yang dilaksanakan atau Tanggapan atau tanggapan responden berada pada kategori 34-65 %.

Kurang Berperan :Apabila tidak satupun dari tiga item yang dilaksanakan Atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah *Metode Kuantitatif* dengan tipe penelitian *Survey*. Penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya di kumpulkan dari sampel atau populasi untuk meneliti seluruh populasi dengan demikian penelitian survey secara komplit adalah penelitian adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan penelitian survey ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kusioner yang dimaksud di atas untuk disebarakan kepada populasi atau sampel yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005;3).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau, Kebersihannya terletak di ibu kotanya yakni Rengat. Rengat dikenal dengan keramahannya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005;90)

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Inspektorat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan, ASN yang menggunakan Mobil Dinas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dalam penelitian dari populasi itu. (Sugiono. 2012:116).

Tabel III.1: Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1	Inspektur	1 orang	1 orang	100%
2	Sekretaris	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Sub Bagian Umum	1 orang	1 orang	100%
4	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	1 orang	1 orang	100%
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang	1 orang	100%
6	ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas	709 orang	40 orang	5%
	Jumlah	714 orang	45 orang	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan beberapa metode yaitu: Untuk Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan karena jumlahnya relatif sedikit maka penarikan sampelnya menggunakan teknik *Sensus* yaitu penulis menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden.

Untuk penulis menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu penulis menentukan sampel dengan cara kebetulan atau yang mudah di jumpai. Dalam hal ini penulis menetapkan sebesar 50 orang dan jumlah sampel dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan

dengan hal tersebut. Data sekunder tersebut adalah gambaran umum Kabupaten Indragiri Hulu dan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu serta struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yaitu guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dapat dibedakan beberapa jenis tergantung dari sudut pandang :

- a. Dipandang dari cara menjawab ada kuesioner terbuka dan Kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka yaitu memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Kuesioner tertutup yaitu yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
- b. Dipandang dari jawaban yang diberikan ada Kuesioner langsung dan ada Kuesioner tidak langsung. Kuesioner Langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. Kuesioner tidak langsung yaitu responden menjawab tentang orang lain.
- c. Dipandang dari bentuknya maka ada Kuesioner pilihan ganda dan ada Kuesioner isian, check () pada kolom yang sesuai, dan ranting scale yaitu

sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.

2. Observasi

Yaitu merupakan teknik yang dilengkapi dengan format atau blangko pegamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

3. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden secara langsung dilokasi penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

a. Wawancara Langsung

Pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Semua yang diwawancarai mendapatkan pertanyaan yang sama.

b. Wawancara Tidak Langsung

Dalam wawancara tidak langsung. Pewawancara memberikan rangsangan atau umpan kepada masyarakat untuk berbicara. Dengan demikian pewawancara memberikan pertanyaan yang berbeda untuk orang yang berbeda.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penganalisan data yang telah yang dikumpulkan melalui hasil penelitian lapangan sesuai dengan sifat dan jenisnya, kemudian dianalisis secara kuantitatif serta dibahas dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta dikaitkan dengan teori yang ada.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Waktu Penelitian Tentang Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																				
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuissoner																					
5	Survay Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Konferehenshif Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																					

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan Sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini berisikan Teori-teori penguraian atau penjelasan dari pengertian definisi, Konsep dan Teori-teori yang menyangkut studi kepustakaan dan dilanjutkan dengan Kerangka Pikir, Konseo Operasional, Operasional Variabel, serta Teknik Pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

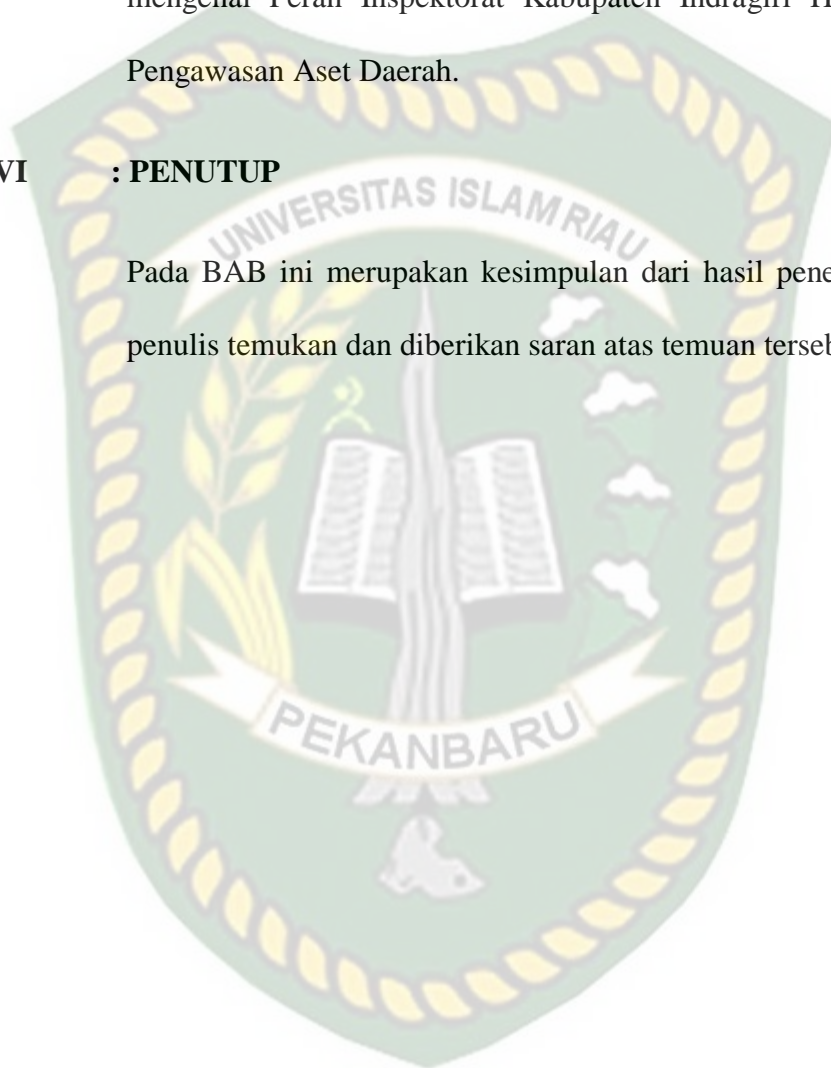
Pada BAB ini membahas mengenai Deskripsi dan Gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini membahas masalah penelitian yang peneliti teliti mengenai Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengawasan Aset Daerah.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan diberikan saran atas temuan tersebut.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan di sebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 kabupaten. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2008 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2000.

1. Demografis

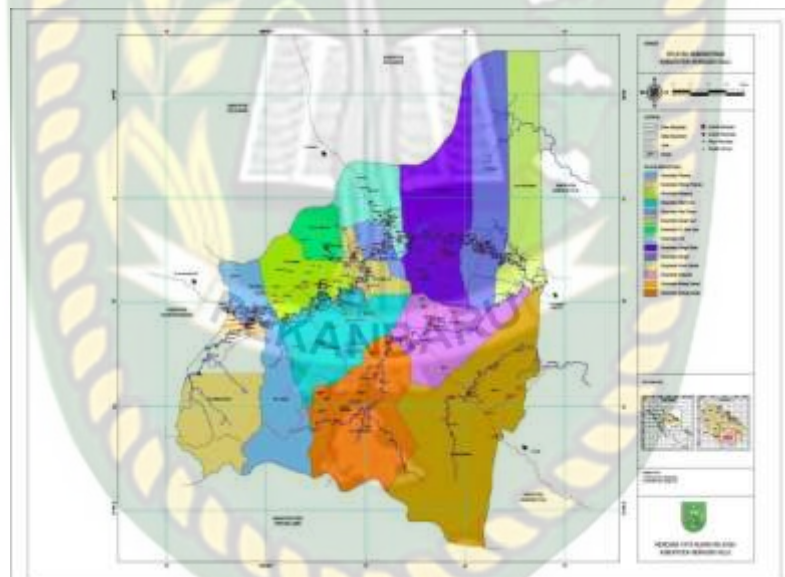
Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa decade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1 20'LS dan 102-

10' BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus.

Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu: Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Timor : Kabupaten Indragiri Hilir Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi



Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 16 kelurahan. Adapun nama-nama kecamatannya adalah sebagai berikut:

Tabel VI. I Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

NO	KECAMATAN	IBUKOTA
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Kelayang	Simpang Kelayang
4	Pasir Penyu	Air Molek
5	P e r a n a p	P e r a n a p
6	Seberida	Pangkalan Kasai
7	Batang Cenaku	Aur Cina
8	Batang Gansal	Seberida
9	L i r i k	L i r i k
10	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku
11	Sei. Lala	Kelawat
12	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal
13	Rakit Kulim	Petonggan
14	Batang Peranap	S e l u n a k

Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 38.47 jiwa/km². Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme. Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan 67,77%, perdagangan 2.43%, industri 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%.

Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km. Pelabuhan Sungai di Kecamatan Kuala Cenaku, 21 km dari Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang

hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana di masa depan. Lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini antara lain listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Siberida dan Peranap.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sendiri pada tahun 2005 sedikit terpengaruh dampak dari ketidakstabilan perekonomian nasional. Beberapa sektor yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar, sedikit terganggu. Namun secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu cukup mengembirakan di tahun tersebut. Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu yaitu “Menciptakan Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Agamis”, maka untuk mewujudkannya, pembangunan ekonomi dan sosial telah diarahkan dan diprogramkan sesuai dengan Visi Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Tentunya dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Indragiri Hulu diperlukan indikator pembangunan yang terukur sehingga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi pembangunannya. Salah satu informasi yang penting dalam kaitannya mengukur perkembangan secara kuantitatif kemajuan perkembangan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dicermati melalui

perkembangan PDRB daerah tersebut. Seperti perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapitanya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu (tanpa migas) menurut lapangan usaha pada tahun 2008 ini menunjukkan arah yang mengembirakan. Pendapatan Regional Indragiri Hulu menurut Lapangan Usaha, 2008-2012. Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Riau pada tahun 2008 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,67 secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 persen, sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,54 persen. Dampak kenaikan BBM walaupun sedikit berpengaruh namun secara umum dampaknya tidak terlalu terlihat pada aktivitas ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu masih sebagian besar adalah sektor pertanian, di mana bisa dilihat dari kontribusi sektor ini yang cukup besar yaitu di atas 47 persen.

Salah satu tujuan pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat tersebut dan dengan disertai pengurangan masyarakat miskin yang antara lain meningkatkan pendidikan dan perbaikan derajat kesehatan yang pada akhirnya akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB per kapita menjadi salah satu ukuran pencapaian kemakmuran suatu masyarakat. PDRB Per kapita dan Pendapatan Per kapita Kabupaten Indragiri

Hulu atas dasar harga berlaku dan konstan 2008 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. PDRB Per kapita Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2004 sebesar 16.110 juta rupiah kemudian terus meningkat menjadi 19.990 juta rupiah pada tahun 2008 dan kemudian meningkat lagi menjadi 23,794 juta tahun 2006, atau telah terjadi peningkatan sebesar 21,53 persen selama kurun waktu 2008-2012.

Setelah memasukkan unsur minyak bumi di dalam penghitungan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu, tercatat pertumbuhan pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012 28 pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 6,87 persen, di mana pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,11 persen. Dapat dikatakan secara makro roda perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2006 dikatakan cukup menggembirakan. Pertumbuhan sektor yang memiliki unsur minyak seperti sektor pertambangan ternyata memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor yang sama dengan tanpa memasukkan unsur minyak bumi. Tahun 2008 laju pertumbuhan, sektor pertambangan dengan minyak bumi tumbuh sebesar 10,51 persen, sedangkan tanpa memasukkan unsur minyak bumi tumbuh sebesar 8,15 persen. Adanya eksploitasi tambang batu-bara dan sedikit membaiknya produksi di sektor ini sehingga mengungkit pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian.

Secara, umum, apabila laju pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan unsur minyak bumi dan gas (migas) Kabupaten Indragiri Hulu dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau akan terlihat bahwa laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Provinsi Riau selama tiga tahun terakhir.

Terlihat perbedaan yang nyata bila memasukkan unsur migas ke dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu khususnya untuk kontribusi Sektor Pertambangan. Walaupun bukan yang paling dominan namun kontribusinya cukup besar, berawal dari 3,04 persen tanpa migas selama tahun 2008 sedangkan setelah memasukkan unsur migas menjadi 7,57 persen selama periode 2008-2012 besarnya kontribusi sektor pertambangan mengalami peningkatan. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor pertanian yaitu sebesar 45,29 persen, sedangkan sektor yang memberikan peranan paling rendah diberikan oleh sektor listrik dan air bersih yaitu selalu sebesar 0,24 persen.

Dengan melihat kecilnya peranan tersebut dalam struktur perekonomian tanpa maupun dengan migas maka sangat diharapkan terlahimya suatu kebijakan yang konstruktif demi menunjang arah kemajuan sektor ini.

C. Topografi

Secara Umum Topografi Kabupaten Indragiri Hulu merupakan wilayah dataran rendah, perbukitan dan rawa-rawa dengan ketinggian 5 sampai dengan 400 m diatas permukaan laut. Bagian yang terluas dari dataran rendah terletak pada ketinggian 25 s/d 100 meter diatas permukaan laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut . Kondisi yang demikian menyebabkan hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi terhadap terjadinya bencana banjir. Potensi banjir tersebut tidak hanya disebabkan

oleh faktor topografi wilayah yang rendah tapi juga dikontribusi oleh banjir kiriman dari daerah lain, mengingat beberapa sungai di daerah ini hulunya berada pada daerah lain.

Diantara sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki peranan penting dan strategis adalah Sungai Indragiri dengan panjang \pm 550 Km. Karena, Sungai Indragiri bukan saja melintasi Kabupaten Indragiri Hulu tetapi juga beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Riau, bahkan hulunya berada pada Danau Singkarak yang merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari posisi wilayah sungai mulai dari hulu sampai ke hilir, maka letak wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berada pada bagian hilir Sungai Indragiri. Selain memberikan berkah, Sungai Indragiri juga sering mendatangkan musibah bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hulu terutama yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut.

Pendangkalan Sungai Indragiri yang diakibatkan dari pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang terkendali baik untuk pemukiman, perkebunan, lahan pertanian maupun aktivitas masyarakat lainnya. Akibatnya kemampuan sungai untuk menampung volume air semakin menurun dan pada musim penghujan volume air yang melebihi daya tampung sungai menyebabkan terjadinya bencana banjir. Disisi lain, pada musim kemarau wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang pada umumnya merupakan rawa bergambut juga berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang bukan saja berdampak negatif terhadap aspek kesehatan tapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Di Kecamatan Rengat dimana tempat penelitian ini dilakukan terdapat 16 desa/kelurahan, yaitu:

1. Kampung Besar Kota
2. Kampung Besar Seberang
3. Kampung Dagang
4. Kampung Pulau
5. Kuantan Babu
6. Pasar Kota
7. Pasir Kemilu
8. Pulau Gajah
9. Rantau Mapesai
10. Rawa Bangun
11. Sei. Guntung Hilir
12. Sei. Guntung Tengah
13. Sekip Hilir
14. Sekip Hulu
15. Sungai Beringin
16. Sungai Raya

D. Sejarah Singkat Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu

Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu terbentuk dan Banyak mengalami perubahan dalam perjalanannya hingga sekarang, perubahan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang banyak mengalami peninjauan kembali yang disesuaikan karena semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mendasari perubahan-perubahan hingga membentuk inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini :

1. Keputusan Menteri dalam Negeri No.100 Tahun 1972;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 1972-1975;
3. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 226 Tahun 1975-1979;

4. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 226 Tahun 1979-1991;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri No.110 Tahun 1991-2001;
6. Keputusan Menteri dalam Negeri No 16 Tahun 2001-2007
7. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007-2014
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 49 Tahun 2016- Sekarang

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata cara kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pasal 2 menyebutkan Kedudukan Inspektorat Kabupaten:

1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Pemerintahan Daerah;
2. Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur;
3. Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tugas Inspektur adalah:

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) terbatas pada kegiatan pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), inspektur mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan pengawasan.

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris membawahi;
- c. Sub Bagian Umum
- d. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- e. Sub Bagian Keuangan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- g. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- h. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- i. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- k. Kelompok jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Kelompok jabatan fungsional umum.

E. Visi dan Misi

Visi Menjadikan Lembaga Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan andal di provinsi Riau. Misi Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggara Pemerintah Daerah

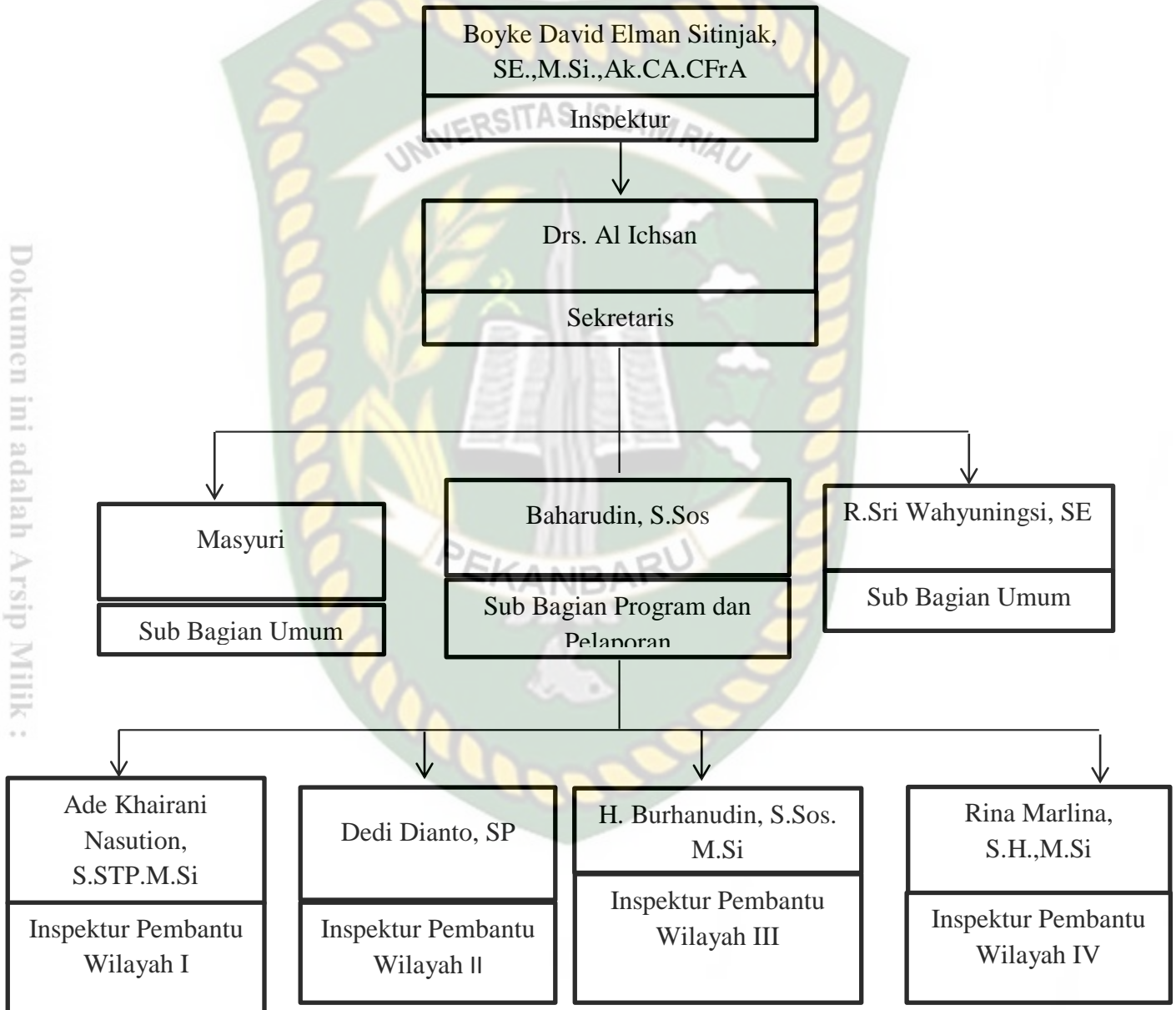
F. Struktur Organisasi dan Uraian Tupoksi Inspektorat Provins Riau

Organisasi adalah suatu sistem saling pengaruh mempengaruhi antara orang dalam kelompok kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Dalam mencapai tujuannya suatu organisasi tidak akan mampu melaksanakannya secara individual melainkan harus bekerjasama. Organisasi dapat di ibaratkan sebagai suatu kesatuan yang terdapat suatu bangunan yang sana antara elemen yang satu dengan yang lain harus saling mendukung agar bangunan tersebut sesuai dengan apa yang di Harapkan.

Bagan Organisasi yang penggambaran secara grafik yang menggambarkan struktur kerja dari suatu struktur organisasi. Bagan organisasi hanya dapat menunjukkan hubungan wewenang yang formal saja namun tidak dapat

mengambarkan seberapa besar wewenang, tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan yang terinci.

Tabel IV.1 : Struktur Organisasi Inspektorat



Sumber, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

1. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi riau dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan

Fungsi :

- a. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitas di bidang Pengawasan
- c. Pemberian pertimbangan kepada gubernur berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan.
- d. Penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu
- e. Perencanaan Program Pengawasan
- f. Pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan, pengaduan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan dalam petunjuk Bupati
- g. Pengelolaan Sumber daya aparatur ,Keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat
- h. Pelayanan teknis aAdministrasi dan Fungsional

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang perencanaan pengawasan

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencanarogram kerja pengawasan dan fasilitas lingkup inspektorat
 - b. Penyusunan anggaran inspektorat.
 - c. Penyiapan laporan dan statistik inspektorat
 - d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
 - f. Pengelolaan Administrasi Sub Bagian Perencanaan
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi program kerja sub bagian perenanaan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang evaluasi dan pelaporan

Fungsi :

- a. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan
- c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
- d. Penyusunan statistik hasil pengawasan
- e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan

- f. Penyiapan bahan, pengadministrasian dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- g. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan
- h. Penghimpunan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- i. Memfasilitasi audit eksternal
- j. Pengelolaan pemuktahiran data
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan inspektorat
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Administrasi dan umum

Sub bagian Administrasi dan umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang pengelolaan administrasi dan umum

Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha dan surat menyurat dan kearsipan
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi pengkajian dan analisis pelaporan inspektorat
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga meliputi, penerimaan pencatatan penyimpanan penindustrian perlengkapan.
- d. Pemeliharaan serta pengendalian barang –barang inventarisasi inspektorat
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian
- f. Pengelolaan urusan keuangan

- g. Pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan inspektorat
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan inspektorat
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan
5. Inspektur pembantu Wilayah I Bidang Keuangan

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyan fungsi yaitu tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi inspektorat dibidang audit dan pengawasan keuangan.

Fungsi :

- a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dibidang keuangan
 - b. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk teknis audit dan pengawasan di bidang keuangan
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan
 - d. Pemberin petunjuk mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan di bidang keuangan
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang keuangan
 - f. Penyelenggaraan pemeriksaan ,pengusulan ,pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang keuangan
 - g. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi pelaporan di bidang keuangan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
6. Inspektur Pembantu Wilayah II bidang Pemerintahan

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang

inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi inspektorat dibidang audit dan pengawasan pemerintahan

Fungsi :

- a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dibidang pemerintahan
 - b. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis auditt dan pengawasan dibidang pemerintahan
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawsan dbidang pemerintahan
 - d. Pemberian petunjuk pengawasai dan membimbing pelaksanaan tuas pengawasan dibidang pemerintahan
 - e. Pelaksanaan pengawasan , pengusutan dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang pemerintahan
 - f. Penyelenggaraan pemeriksaan ,pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawsan dibidang pemerintahan
 - g. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan dibindang pemerintahan
 - h. Penyiapan bahan audit dan pengawasan dibidang pemerintahan
 - i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
7. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pembangunan

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang

Inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi

inspektorat dibidang audit dan pengawsan pembangunan

Fungsi :

- a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan prgram kerja pengawasan dibidang pemerintahan
- b. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis audit dan pengawasan di bidang pembangunan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pembangunan
- d. Pemberian petunjuk ,mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pembangunan
- e. Pelaksanaa pengawsan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang pembangunan
- f. Penyelenggaraan pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan
- g. Pelaksanaan bahan audit dan pengawasan
- h. Penyiapan bahan audit dan pengawaasan dibidang pembangunan
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu
- j. Pelaksanaan tugas lain diberika oleh atasan

8. Inspektor Pembantu Wilayah IV Bidang Ekonomi

Inspektur pembantu Wilayah IV bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang inpektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebaga fungsi inspektorat dibidang audit dan pengawasan Ekonomi

Fungsi :

- a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawas dibidang Ekonomi
 - b. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis audit dan pengawasan dibidang Ekonomi
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas dibidang Ekonomi
 - d. Pemberian petunjuk ,mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dibidang Ekonomi
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang Ekonomi
 - f. Penyelenggaraan Pemeriksaan Pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang Ekonomi
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ekonomi
 - h. Penyiapan bahan audit dan pengawasan dibidang Ekonomi
 - i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi dibidang Ekonomi
 - j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan
9. Jabatan Fungsional Inspektorat

Jabatan Fungsional Inspektorat terdiri atas pengawas pemerintah dan auditor

- a. Pengawas Pemerintahan

Tugas Pokok Pengawas pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan

pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada inspektur-inspektur wewang pengawas pemerintahan adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang , instansi pemerintah, badan usaha negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawas pemerintahan dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kode etik pengawas.

a. Auditor

Tugas pokok auditor adalah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan, auditor yang melaksanakan tugas pokok harus mendapatkan surat tugas dari dan bertanggung jawab kepada inspektur dalam melaksanakan audit dan pengawasan. Auditor berkoordinasi dengan inspektur pbantu dalam melaksanakan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, sosialisasi asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi manajemen resiko , pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi , auditor berwenang untuk :

1. Memperoleh keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait
2. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat –surat bukti-bukti , rekening koran dan daftar
3. Yang terkait dengan penugasan

4. Menetapkan jenis dokumen,serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawsan
5. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat isntansi yang di awasi
6. Menggunakan tenaga diluar tenaga auditor jika di perlukan

b. Organisasi Dalam Lingkup Inspektorat

Jenjang jabatan fungsional auditor sebagaimana terdiri atas auditor terampil dan auditor ahli

Jenjang dan auditor

- a. Auditor terampil pelaksana
- b. Auditor terampil pelaksana lanjutan
- c. Auditor penyedia

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor ahli

- a. Auditor Pertama
- b. Auditor Muda
- c. Auditor Madya
- d. Aduditor Utama

Aktifitas Organisasi

Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Instansi Pemerintahan yang bergerak di bidang pengawsan guna menjaga aset Daerah. Inspekorat merupakan auditor internal yang menyediakan jasa kepada pemerintah umum terutama dalam bidang audit atas pelaporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah

tugas internal auditor adalah memeriksa opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang di susun oleh pemerintah berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh ikatan Indonesia dan standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menjalankan pekerjaannya Inspektorat berperan sebagai pembina instansi instansi pemerintah dan unit kerja, terutama dalam hal pengamanan aset Daerah dan negara, efektifitas dan efisiensi dari operasional organisasi dan penjamin terhadap laporan keuangan berjalan dan sesuai dengan standarnya dan sekaligus berperan sebagai auditor dan untuk itu harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaannya, adapun aktifitasnya adalah :

1. Melakukan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dan tugas pengawasan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mengambil data melalui instrument penelitian yaitu Kuesioner, Wawancara dan Obsevasi yang di lakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden penelitian dan wawancara dengan Inspektur dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan serta tinjauan peneliti pada lokasi penelitian dengan melihat kegiatan yang sedang atau telah berlalu, yang mana kesemuanya di butuhkan dalam hal mengambil kesimpulan penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan dari responden penelitian yaitu akan di dapatkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden penelitian ini sebagai salah satu cara untuk menginformasikan gambaran responden secara umum seperti tingkatan pendidikan,

umum dan jenis kelamin Identitas responden berguna untuk mengetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

menggambarkan bagaimana kondidi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelasnya identitas responden pegawai Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Pegawai Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Pria	5	70%
2	Wanita	2	30%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Dari data V. 1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden lebih banyak di dominasi oleh laki-laki yaitu berjumlah 5 orang atau 70% dan wanita yang berjumlah 2 atau 30%. Untuk selanjutnya pengelompokkan responden penelitian berdasarkan umur atau usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2. Distribusi Responden PNS yang menggunakan Kendaraan Dinas Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Umur .

No.	Usia	Populasi	Persentase
1	< 30 tahun	4	10%
2	30-39 tahun	19	50%
3	40-49 tahun	15	35%
4	>50 tahun	2	5%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data penelitian, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa pada responden penelitian ini berdasarkan tingkat umur. Responden yang berumur di bawah 30 tahun, berjumlah 4 orang atau 10%,kemudian untuk umur 30-39 tahun 19 orang dan umur 40-49 sebanyak 15 orang

yang terakhir untuk umur diatas 50 tahun sebanyak 2 orang atau 5% sehingga jika dilihat dari tingkatan Umur responden penelitian dalam katagori memadai.

B. Hasil dan Pembahasan

Setelah menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden penelitian yang terdiri pegawai Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, maka selanjutnya setelah angket tersebut diisi oleh responden selanjutnya peneliti mengolah data tersebut, melakukan pengelompokkan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator dan masing-masing pembagian responden penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran

Yang dimaksud dengan standar disini adadalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari satu unit kerja, Standar dapat juga disebut sebagai ukuran untuk menilai kinerja organisasi atau unit kerja dari organisasi.

Tabel V.3 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Inspektorat) Mengenai Menetapkan beberapa Jenis Standar dan Sasaran

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Adanya Standar	4	1	-	5
2	Adanya Sasaran	4	1	-	5
	Jumlah	8	2	-	10
	Rata-rata	4	1	-	5
	Persentase	80%	20%		100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Sesuai dengan tabel V.3 di atas dapat di ketahui untuk jawaban responden Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengenai Menetapkan beberapa Jenis standar dan Sasaran pada indikator pertanyaan pertama terkait dengan adanya Standar dalam pengawasan aset daerah diketahui 4 dari 5 orang pegawai mengatakan baik dan sisanya 1 orang mengatakan Kurang Baik kemudian untuk indikator kedua terkait adanya sasaran yaitu 4 dari 5 orang mengatakan baik dan hanya 1 orang yang mengatakan Kurang Baik, dan secara keseluruhan pada indikator Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran ini dapat di ketahui Baik. Sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala sub Bagian pelaporan pada tanggal 24 Februari 2020 yaitu :

“dalam melakukan pengawasan kami sangat jelas memiliki standar atau terget dalam pelaksanaannya dan juga sasaran dalam pengawasan aset daerah ini untuk semua ASN yang di Kabupaten Indragiri Hulu”

Sedangkan Jawaban responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas di Kabupaten Indragiri Hulu:

Tabel V.4 Penilaian Terhadap Jawaban Responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Mengenai Menetapkan beberapa Jenis Standar dan Sasaran

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Adanya Standar	5	30	5	40
2	Adanya Sasaran	6	26	8	40
	Jumlah	11	56	13	80
	Rata-rata	5	28	7	40
	Persentase	10%	70%	20%	100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Dapat diketahui dari Tabel V.4 di atas penilaian terhadap jawaban responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas mengenai menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran yaitu untuk indikator pertanyaan pertama adanya Standar yaitu 5 dari 40 orang mengatakan Berperan kemudian sisanya 30 orang mengatakan Cukup Berperan, dan 5 orang mengatakan Kurang Berperan kemudian untuk indikator pertanyaan kedua terkait dengan adanya Sasaran dalam pengawasan Aset Daerah ini 6 dari 40 orang mengatakan Berperan dan 26 orang mengatakan Cukup Berperan dan 8 orang yang mengatakan Kurang Berperan secara keseluruhan untuk jawaban responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas dapat diketahui Cukup Berperan. Sesuai dengan Hasil Wawancara dengan salah satu ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas pada tanggal 20 Februari 2020 yakni :

“terkait dengan standar atau target dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kami kurang mengetuinya sama halnya dengan sasaran dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat ini kami juga tidak mengetahuinya secara jelas “

Berdasarkan Hasil Obserasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu tidak sepenuhnya mengetahui standar atau target dari Inspektorat.

2. Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar.

Dalam mengukur Kinerja langkah mengukur kinerja merupakan prosesn yang berlanjut dan repetitive, denga frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang di ukur kemudian membandingka kinerja sesuai dengan standar diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar

yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan, maka pimpinan akan berasumsi bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar, mereka tidak perlu aktif mengintervensi dalam sebuah organisasi atau badan.

Tabel V.5 Penilaian Terhadap Jawaban Responden Inspektorat Mengenai Mengukur dan membandingkan kinerja sesuai dengan standar

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melihat Fakta di Lapangan	4	1	-	5
2	Membandingkan Hasil dengan Target Kerja	3	2	-	5
	Jumlah	7	3	-	10
	Rata-rata	4	1	-	5
	Persentase	70%	30%	-	100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Sesuai dengan tabel V.6 diatas bahwa jawaban responden Inspektorat mengenai indikator pertanyaan mengukur dan membandingkan kinerja sesuai dengan target atau standar bahwa untuk indikator pertanyaan pertama 4 dari 5 orang mengatakan berperan dan sisanya hanya 1 orang yang mengatakan Cukup Berperan kemudian untuk indikator pertanyaan kedua terkait dengan membandingkan hasil kerja dengan target yaitu 3 dari 5 orang mengatakan Berperan dan 2 orang mengatakan Cukup Berperan dan secara keseluruhan hasil jawaban responden terkait dengan indikator pertanyaan mengukur dan membandingkan hasil dengan target dapat dikatakan Berperan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Pelaporan pada tanggal 20 Februari 2020 mengatakan :

“Kami telah melihat secara fakta mengenai ASN yang menggunakan kendaraan Dinas di luar jam kerja dan kami telah melakukan tindakan lebih lanjut karena itu jelas melanggar aturan”

Kemudian Hasil jawaban responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.6 Penilaian Terhadap Jawaban Responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Mengenai Menetapkan beberapa Jenis Standar dan Sasaran

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melihat Fakta Dilapangan	6	25	9	40
2	Mengukur hasil dengan Target	4	28	8	40
	Jumlah	10	53	17	80
	Rata-rata	5	26	9	40
	Persentase	10%	70%	20	100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Sesuai dengan tabel V.6 diatas bahwa jawaban responden Inspektorat mengenai indikator pertanyaan mengukur dan membandingkan kinerja sesauai dengan target atau standar bahwa untuk indikator pertanyaan pertama 6 dari 40 orang mengatakan berperan, kemudian 25 orang mengatakan Cukup Berperan dan sisanya hanya 9 orang yang mengatakan Kurang Berperan kemudian untuk indikator perntanyaan kedua terkait dengan membandingka hasil kerja dengan target yaitu 4 dari 40 orang mengatakan Berperan dan 28 orang mengatakan Cukup Berperan dan 8 orang mengatakan Kurang Berperan dan secara keseluruhan hasil jawaban responden terkait dengan indikator pertanyya mengukur dan membandingkan hasil dengan target dapat

dikatakan Cukup Berperan. Hasil wawancara dengan ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 22 Februari 2020 yakni :

“Saya selaku ASN di lingkungan kabupaten Inhu , saya kurang mengetahui bahwa inspektorat telat melihat masalah penggunaan Kendaraan Dinas di luar jam Kerja dan selama ni saya tidak mengataui adanya ASN yang di proses terkait Penggunaan Kendaraan dinas di luar jam kerja ini”

3. Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif

Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif diartika ketika adanya perilaku yang melanggar standar atau terget makan harus dilakukan pengecekan terhadap masalah yang terjadi itu dan ketika telah di lakukannya sebuah identifikasi yang bertujuan untuk melihat masalah yang terjadi maka dilakukan tindakan korektif atau penyelesaian dari sebuah masalah.

Tabel V.7 Penilaian Terhadap Jawaban Responden Inspektorat Mengenai Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Identifikasi terhadap penyimpangan	5	-	-	5
2	Melakukan tindakan Korektif	3	2	-	5
	Jumlah	8	2	-	10
	Rata-rata	4	1	-	5
	Persentase	80%	20%	-	100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Sesuai dengan tabel V.7 diatas bahwa jawaban responden Inspektorat mengenai indikator pertanyaan Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif bahwa untuk indikator pertanyaan pertama 5 dari 5 orang mengatakan berperan atau semua responden untuk indikator pertanyaan pertama kemudian untuk indikator pertanyaan kedua terkait dengan Melakukan tindakan Korektif yaitu 3 dari 5 orang mengatakan baik dan 2 orang mengatakan Cukup Berperan dan secara keseluruhan hasil jawaban responden terkait dengan indikator pertanyaan mengukur dan membandingkan hasil dengan target dapat dikatakan Berperan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Pelaporan pada tanggal 20 Februari 2020 mengatakan :

“ketika setiap ada pelaporan terkait dengan Masalah Aset daerah kami langsung mengidentifikasi masalah tersebut dan ketika telah terjadi penyimpangan akan ada tindakan korektif dari kami”

Kemudian Hasil jawaban responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.8 Penilaian Terhadap Jawaban Responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Mengenai Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan identifikasi terhadap penyimpangan	3	26	11	40
2	Melakukan tindakan korektif	4	22	14	40
	Jumlah	7	48	25	80
	Rata-rata	3	24	13	40
	Persentase	10%	60%	30%	100%

Sumber data olahan peneliti 2020

Sesuai dengan tabel V.8 diatas bahwa jawaban responden Inspektorat mengenai indikator pertanyaan Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif bahwa untuk indikator pertanyaan pertama terkait dengan melakukan identifikasi terhadap penyimpangan 3 dari 40 orang mengatakan Berperan, kemudian 26 orang mengatakan Cukup Berperan dan sisanya hanya 11 orang yang mengatakan Kurang Berperan kemudian untuk indikator pertanyaan kedua terkait dengan melakukan tindakan korektif yaitu 4 dari 40 orang mengatakan berperan dan 22 orang mengatakan Cukup Berperan dan 14 orang mengatakan Kurang Berperan dan secara keseluruhan hasil jawaban responden terkait dengan indikator pertanyaan mengukur dan membandingkan hasil dengan target dapat dikatakan Cukup Berperan.

Selanjutnya dari tiga Indikator yang telah di uraikan diatas mengenai Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset daerah disajikan tabel Rekapitulasi penilaian terhadap jawaban Responden

Tabel V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden (Inspektorat)

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran	4	1	-	5
2	Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar	4	1	-	5
3	Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif	4	1	-	5
	Jumlah	12	3	-	15
	Rata-rata	4	1	-	5
	Persentase	80%	20%		100%

Sumber data olahan 2020

Sesuai dengan tabel V.9 di atas dapat di ketahui bahwa Rekapitulasi penilaian jawaban responden Inspektorat terkait dengan Peran Inspektorat Kabuapten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah dapat di Kategorikan Baik, karena 4 dari rata rata 5 orang responden atau 80% dari total responden menyatakan baik, sesuai dengan teknik penilian yang telah di buat, maka 80% berada di interval 66%-100%, maka hasil rekapitulasi berdasarkan jawaban dari responden Inspektorat dinyatakan Baik.

Sedangkan dilihat dari Hasil Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan responden ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden (ASN yang menggunakan kendaraan Dinas)

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Menetapkan beberapa jenis standar dan sasaran	5	28	7	40
2	Mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar	5	26	9	40
3	Identifikasi penyimpangan dan pengembalian tindakan korektif	3	24	13	40
	Jumlah	13	78	29	120
	Rata-rata	5	26	9	40
	Persentase	10%	65%	25%	100%

Sumber data olahan 2020

Sesuai dengan tabel tersebut diketahui penilaian terhadap jawaban tentang Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah dapat di kategorikan “ Cukup Baik” , karena rata 40 orang responden yang menyatakan kurang Baiki adalah 26 orang dengan persentase 65%, maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat dapat di ketahui bahwa 65% berada di interval 33%-66% dengan kategori Cukup Baik.

Selanjutnya dapat di lihat Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan mengenai Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah.

Tabel V.11 Rekapitulasi Jawaban Responden (Inspektorat dan ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas)

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Inspektorat	4	1	-	5
2	ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas	5	26	9	40
	Jumlah	9	27	9	45
	Persentase	20%	60%	20%	100%

Sumber data olahan 2020

Sesuai dengan data tersebut dapat di katakan penilaian terhadap jawaban tentang Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan (Inspektorat dan ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas) dapat di Kategorikan Cukup Berperan, karena 45 orang Responden yang mengatakan Cukup Berperan sebanyak 27 orang atau 60%. Maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat berada di interval antara 33% s/d 66% dengan Cukup Berperan.

C. Faktor-faktor Penghambat Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah.

Berdasarkan Hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara bersama Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sub Bagian Pelaporan, dan ASN di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu yang menggunakan Kendaraan Dinas. Diketahui beberapa hambatan yang di peroleh dalam Peran

Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah, adapun Hambatan yang di hadapi adalah :

1. Masih Banyaknya ASN yang tidak memahami dan menyadari tentang Aturan dalam Penggunaan Kendaraan Dinas
2. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Dinas
3. Masih Kurangnya tindakan tindakan Korektif yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi Aset daerah berkaitan dengan penggunaan Kendaraan Dinas di Luar Jam Dinas yang bertujuan untuk meminimalisir ternyadinya penyimpangan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diketahui bahwa Peran Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengawasan Aset Daerah dapat di Kategorikan Cukup Berperan. Ini dapat dilihat dari jawaban responden dari 3 indikator yang ada , dan yang paling menonjol dari ketiga Indikator tersebut yaitu indikator identifikasi penyimpangan dan melakukan tindakan Korektif, karena dalam pelaksanaannya masih ada ASN yang tidak mengetahui apakah Inspektorat telah melakukan Identifikasi terhadap penyimpangan yang terjadi khususnya terkait dengan penggunaa kendaraan di luar jam Dinas serta mereka juga tidak melihat tindakan korektif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut.
2. Diketahui terdapat beberapa hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan aturan ini yaitu :
 - a. Masih Banyaknya ASN yang tidak memahami dan menyadari tentang Aturan dalam Penggunaan Kendaraan Dinas
 - b. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Di Luar Jam Dinas
 - c. Masih Kurangnya tindakan tindakan Korektif yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi Aset daerah

berkaitan dengan penggunaan Kendaraan Dinas di Luar Jam Dinas yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut.

B. Saran

1. Disarankan Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih mematuhi aturan yang ada terkait dengan penggunaan Kendaraan Dinas , dan tidak melakukan penyimpangan seperti menggunakan Kendaraan Dinas di Luar jam Dinas ini akan dapat merugikan Daerah karena kendaraan tersebut merupakan Aset daerah .
2. Disarankan kepada Inspektorat lebih perketat dalam pengawasan terhadap penggunaan Kendaraan Dinas Di luar kerja yang dapat merugikan daerah kemudian harus cepat dalam mengidentifikasi masalah masalah yang di dapati yang kemudian harus ada tindakan lebih lanjut yang bertujuan agar ASN di Kabupaten Indragiri Hulu dapat mematuhi aturan yang ada khususnya dalam penggunaan kendaraan Dinas.
3. Disarankan untuk Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat melakukan tindakan tindakan korektif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terkait dengan penggunaan Kendaraan dinas Sebagai aset Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

D. Buku

- Awang, Azam Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Darwis. 2007. *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru, Yayasan Pustaka.
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty Grasindo, Jakarta.
- K, Soekarno. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Miswar, 1986.
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- _____ 2009. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Damai.
- Musanef. 2000. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta
- _____ . 2011. *Kybernologi*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____ . 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta, Rineka Cipta.

Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta

Soekanto, soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.

_____ . 2002. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.

_____ . 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.

_____ . 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Perca. Jakarta.

_____ . 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.

E. Dokumentasi

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelola Barang Milik Negara

Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata cara kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.